

# DARI KSATRIA MENJADI PARIA;<sup>1</sup>

## Degradasi Peran dan Pembunuhan Politik Sistematis Catatan Awal Peristiwa '65/'66 di Jogjakarta

**Rumekso Setyadi  
dan Saiful H. Shodiq**  
Keduanya peneliti di Syarikat Indonesia

*Merpati Tak Pernah Kembali  
ke Kandang  
Buat Yayori Mitsui*

*Rejam kata-kata buaian kalimat  
Melukiskan kesaksian tentang kepapaan  
Merangkai huruf demi huruf yang tidak lagi  
teratur  
Abjad tidak lagi bisa dieja  
Sebab sudah terlalu sulit kita untuk memulainya  
Kau mulai dari awal tapi mereka bilang dari  
belakang  
Kau bilang penderitaan tapi mereka bilang  
kemakmuran  
Kita harus belajar mengeja lagi kawan  
Menggambar lagi garis-garis untuk membentuk  
abjad  
Menemukan huruf dan merangkai kalimat  
Dan akhirnya kita baca dengan tidak tergesa-  
gesa*

### ABSTRAKSI

Sejarah adalah serangkaian dongeng yang telah disepakati. Demikian menurut Voltaire. Dalam sebuah proses politik, baik secara damai maupun dengan kekerasan, kesepakatan dibuat, terutama oleh mereka yang memegang kekuasaan mayoritas. Media ingatan kolektif (*collective memory*) digunakan untuk menguasai ingatan, sekaligus untuk mengendalikan proses mengingat itu.

Tafsir monolitik atas "sejarah resmi" tentang peristiwa '65/'66 menjadi contohnya. Kisah tragedi perubahan politik pada tahun '65/'66, dengan menggunakan faktor ataupun aktor tunggal dalam menganalisa peristiwa itu, diperlakukan

---

<sup>1</sup>Judul ini diadaptasikan dari analisa Benedict ROG Anderson tentang pandangan hidup orang Jawa yang diambil dari pertunjukan wayang, bahwa sisi kanan (baik) dan sisi kiri (jahat) tidaklah pasti, dapat berganti peran atau posisi, tergantung dari mana dua sisi kelir dilihat dalam pementasan wayang, *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa* (Jogjakarta: Qalam, 1999), hlm. 4-5. Ini terlepas dari kritik banyak orang atas buku Ben yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi di peristiwa 1965/66, terutama mengenai kepribadian orang Jawa.

sebagai sejarah yang sudah “terterimakan kebenarannya” (*accepted history*) di masyarakat. Determinisme dalam sejarah memang sesuatu yang sah. Tetapi determinisme berarti mematikan proses “dialog” antara masa lalu dan masa kini. Sebab, fakta dalam sejarah yang dibangun untuk sebuah proses eksplanasi historis bukanlah sesuatu yang berdimensi tunggal. Ketika fakta baru ditemukan, maka sebuah eksplanasi sejarah baru dapat dibuat, dengan tanpa menafikan konstruksi lama yang sudah terbangun. Sebab, dengan demikianlah, sejarah akan kelihatan lebih demokratis dan lebih beragam.

Peristiwa ‘65/’66 adalah wilayah gelap bagi sejarah Indonesia. Hal ini tidak saja disebabkan karena sifat kontemporeranya. Tetapi juga tentang perdebatan *challenge and response* seperti yang dilansir Arnold Toynbee. Sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan dan sangat menentukan jalan hidup masa depan bagi yang mengalaminya secara langsung maupun anak cucunya. Satu gejolak politik yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia, di mana ratusan ribu nyawa orang terbantai, sementara jutaan yang lainnya harus dibuang di kamp-kamp pulau terpencil<sup>2</sup>.

Peristiwa ‘65/’66 di Indonesia juga mewakili salah satu tragedi kemanusiaan terburuk dunia di abad ke-20. Kenyataan itu, perlu sekali untuk diungkap dan

diletakkan dalam proporsi yang seluas-luasnya. Bukan dengan maksud untuk kembali membuka “luka” lama yang telah lewat, tetapi digunakan sebagai batu pijak untuk membangun sebuah peradaban baru Indonesia yang lebih demokratis dan terbuka.

Laporan penelitian awal atas peristiwa ‘65/’66 di Jogjakarta ini satu ikhtiar untuk mencoba mendialogkan kembali sejarah, dengan melibatkan proses mengingat masa lalu, menyesuaikannya dengan kebutuhan masa kini, serta menjadikannya sebagai modal untuk membangun masa depan. Dengan demikian, kita tidak terjebak lagi dalam upaya mencari “pembenaran” sejarah, tetapi berusaha mencari “kebenaran” dalam sejarah.

Leopold Von Ranke menyarankan, untuk membangun sebuah rekonstruksi sejarah yang mendekati kebenaran, maka sejarah harus ditulis dengan “apa yang nyata-nyata terjadi” (*wie es eigentlich gewesen ist*). Disadari bahwa jarak yang terbentang antara masa kini dengan masa lalu sangat mempengaruhi proses rekonstruksi peristiwa. Tetapi setidaknya selalu diusahakan —walaupun sarat subjektivitas— untuk mendudukkan sebuah peristiwa sesuai dengan semangat zamannya (*zeitgeist*).

Selain itu, perubahan sosial dan politik yang terjadi pada tahun ‘65/’66, diikuti pula dengan keadaan *social*

<sup>2</sup>Mengenai jumlah korban pembantaian ini masih menjadi perdebatan. Lihat Robert Cribb, *The Indonesian Killings of 1965-1966 Studies from Java and Bali* (Victoria: Southeast Asian Studies Monash University, 1991).

*anomaly*. Mungkin zaman itu memang zaman *Kalabendhu*, seperti kata Ronggowarsito. Bukan saja peristiwa pembunuhan tujuh jendral di Jakarta yang mengemparkan, tetapi justru keadaan sesudahnya di mana banyak orang dibantai secara mengenaskan. Dan bahwa situasi nasional waktu itu, tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menjelaskan rangkaian peristiwa di daerah. Orang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Juga yang terfikirkan hanya mana kawan dan lawan. Arti kata, dalam zaman *kalabendhu* itu berlaku bahwa, kebenaran sejarah datang dari satu arah penguasaan atas cerita dan pembenaran tindakannya tanpa *reserve*.

Jogjakarta sebagai wilayah yang menjadi pusat kekuasaan pra-nasional, memiliki kompleksitas dan dinamika tersendiri pada saat peristiwa '65/'66 terjadi. Secara kultural masyarakat Jogja adalah masyarakat feodal. Tetapi juga simbol dari gerakan revolusi, bersamaan dengan *image* tentang kota yang penuh dengan pergulatan intelektual. Di Jogja pula pertama kali didirikan perguruan tinggi dalam masa revolusi.

Dalam konteks inilah tulisan yang didasarkan pada penelitian ini berusaha menjelaskan kompleksitas tersebut dengan mendudukkannya dalam konteks peristiwa '65/'66, dengan tidak berpretensi untuk menghakimi. Sebab, sejarah bukan "menilai", tetapi "berusaha untuk memahami", demikian kata orang-orang bijak.

## HIPOTESA

*Social anomaly* yang terjadi pada tahun '65/'66 dipicu dari petualangan kelompok perwira progresif di Angkatan Darat (AD), terutama di Divisi VII Diponegoro. Hal ini dianalisa Ben Anderson sebagai gerakan di internal AD, dan telah meluluh-lantakkan sebuah organisasi politik yang kuat dan mengakar di tingkatan *grassroot*.<sup>3</sup>

Kejadian di Jogja sendiri pada taraf tertentu dapat menjadi replika dari peristiwa yang terjadi di Jakarta. Sekelompok perwira dalam Komando Resort Militer (Korem) 072 Jogjakarta dengan bantuan dari beberapa pasukan batalyon-batalyon di bawah komando Korem 072 melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap pimpinan mereka, Katamsa dan Sugiyono, serta dilanjutkan dengan menduduki Radio Republik Indonesia (RRI) Jogjakarta untuk menyiarkan pengumuman Dewan Revolusi (Derev) wilayah Jogjakarta.

Fakta peristiwa yang (mungkin) ironis. Peristiwa itu adalah sebuah gerakan militer. Mereka yang memegang senjata melakukan aksi terhadap tentara yang lain. Tetapi yang kemudian dihancurkan adalah organ sipil, sebab salah dalam kalkulasi politik dan mendukung gerakan Derev.

Situasi sosial dan politik pada masa pra-Gestapu tentu sangat mempengaruhi terjadinya persaingan politik di dalamnya.

<sup>3</sup>Anderson, Benedict ROG dan Mc Vey, *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal* (Jogjakarta: LKPSM-Syarikat, 2001), hlm. 13.

Konteks Jogja dengan segala kompleksitasnya, setidaknya ada empat faktor yang dapat digunakan untuk menganalisisnya. *Pertama*, di Jogja peranan kekuatan feodalisme tradisional dengan kraton dan sultannya mempunyai pengaruh yang sangat kuat. *Kedua*, kekuatan dari golongan komunis yang menduduki suara mayoritas dalam parlemen karena memenangkan pemilu 1955 dan pemilu daerah 1957. *Ketiga*, persaingan politik yang merasuk dalam kampus sebagai pusat kegiatan intelektual. *Keempat*, konflik internal AD (baca Korem 072) di Jogja sebagai bagian dari konflik yang terjadi di pusat. Dari keempat faktor di atas diharapkan dapat membangun rekonstruksi ataupun struktur narasi yang kurang lebih dapat menjelaskan peristiwa 1965 di Jogjakarta.

## NGAJOGJAKARTA HADININGRAT

Eksistensi Jogjakarta ditandai dengan perjanjian damai pada tahun 1755 di desa Gianti. Perjanjian Gianti yang dalam perpustakaan Jawa dikenal dengan nama *pulihan nagari*, memecah Mataram menjadi dua. Di sebelah Barat, Pangeran Mangkubumi mendirikan kerajaan Mataram baru dengan ibukota Ngajogjakarta Hadiningrat. Bagi Selo Soemarjan, struktur masyarakat di Jogjakarta sangat

terpengaruhinya.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah wilayah kerajaan kuno, Jogja mempunyai daya atau kekuatan kosmis yang menurut perhitungan Jawa mempunyai keistimewaan. Perhitungan secara kosmologi itu dilihat dari wilayahnya yang mampu mempertemukan antara Gunung Merapi —tiangnya bumi yang menyangga antara langit dan bumi— dan Pantai Selatan —tempat berkuasa dan bersemayamnya Nyi Roro Kidul— sebagai tempat semua kekuasaan supra-manusia terpusat. Sementara sebagai wilayah dari sebuah negara (modern) Indonesia, Jogja mendapatkan kedudukan istimewa, dan diakui keistimewaannya dengan tegas sejak permulaan revolusi nasional Indonesia.

Pergeseran dalam tata sosial dan politik pemerintahan terjadi, terutama sejak Thomas Standford Raffles menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda, dari birokrasi tidak langsung ke birokrasi langsung. Dan kekuasaan birokrasi mencakup daerah dataran tinggi bergunung-gunung yang mengelilinginya dengan sebutan *zuiden gebergton* (zona pegunungan seribu); berkapur dan yang sampai kini diidentikkan dengan kekeringan, tandus dan kemiskinan.<sup>5</sup>

Sedangkan dari sudut pertarungan kebudayaan, Redfield mengelompokkannya dalam *great tradition* dan *litle tra-*

<sup>4</sup>Selo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 19.

<sup>5</sup>Baca Fajar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani* (Jogjakarta: Media Pressindo, 2000).

terjadinya persaingan politik di dalamnya. *ditation*. Atau dengan kata lain, penduduk Jogja dapat dianalogikan sebagai budaya kota versus budaya desa. 15% penduduk Jogja adalah priyayi, bangsawan dan pedagang tinggal di kota satu-satunya, sedangkan sisanya tinggal di pedesaan sebagai petani dan buruh.

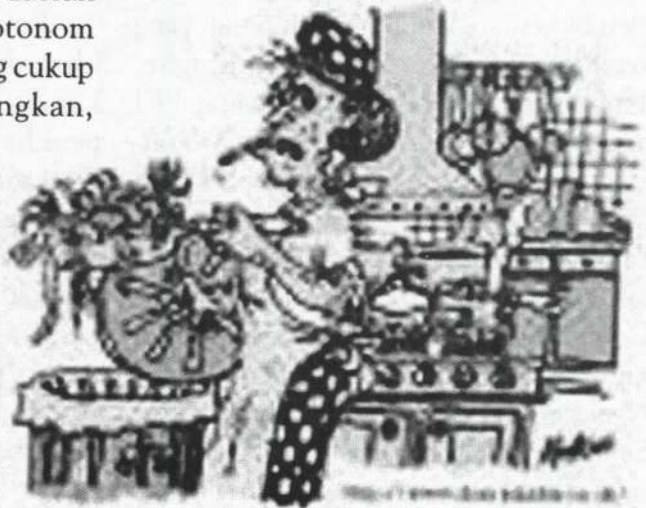
### JOGJA PASCA REVOLUSI 1945

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan penggantian negara kolonial Hindia Belanda ke Indonesia membawa dampak perubahan bagi tata sosial dan politik. Meskipun menurut Ong Hok Ham, negara bangsa Indonesia tidak lain dari sebuah *successor state*, di mana kekuasaan berada di tangan kelompok status quo dan golongan-golongan yang mendukung kekuasaan sebelumnya.<sup>6</sup> Sebagai daerah yang memiliki pemerintahan otonom (*swapraja*), berita proklamasi yang cukup mengejutkan dan membingungkan, dalam waktu relatif cepat direspon oleh kalangan nasionalis dengan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) tanpa menunggu perintah dari Jakarta. Anggota KNI dipilih antara lain mewakili kaum nasionalis, sosialis, agamawan, kaum tani-buruh serta organisasi pemuda dan wanita.

Perubahan besar ini berlang-

sung tanpa Sri Sultan, meskipun mendapat sambutan rakyat sangat antusias. Kemudian, Sultan membuat pernyataan mendukung kemerdekaan nasional itu pada tanggal 9 September 1945.<sup>7</sup> Disusul pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan sebuah maklumat oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta tentang pembentukan partai-partai politik.

Partai politik terkemuka di Jogja dapat dipetakan, antara lain: (1) PNI yang dipimpin oleh kaum intelektual berpendidikan barat yang tinggal di kota dan meluas terutama ke kalangan kelas priyayi yang bekerja sebagai pamongpraja. (2) Masyumi, partai Islam modern, didirikan sebagai kelanjutan dari organisasi Majlis Syuro A'la Indonesia yang pada awal mula didirikan oleh pemerintahan



<sup>6</sup>Ong Hok Ham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 5-6. Bandingkan pula dengan Anton Lucas, *Revolusi Tiga Daerah* (Jakarta: Grafiti, 1991).

<sup>7</sup>Selo Soemardjan, *op cit*, hlm. 58-59.

dan Muhammadiyah merupakan kekuatan intinya. (3) NU, partai Islam ortodoks, terdapat di Wonokromo, desa yang terletak kira-kira 16 km di sebelah tenggara Jogja, dan pesantren Krapyak di perbatasan selatan kota Jogja. (4) PKI, melakukan rekrutmen anggota tidak secara langsung. Partai ini berusaha memperoleh fasilitas-fasilitas resmi dari KNI untuk mengorganisasikan kaum tani ke dalam BTI dan kaum buruh ke dalam BBI dan kemudian ke SOBSI. PKI juga berhasil mendapatkan dukungan aktif dari ketua PPDI (Persatuan Pamong Praja Desa) di Gunung Kidul, dan mengusahakan agar pengurus PPDI di kabupaten mendukung PKI. Strategi yang dilakukan PKI berhasil mendapatkan massa pengikut yang terorganisir dan berpengaruh. Selain itu PKI mengembangkan teknik untuk membina suatu kelompok pimpinan yang kecil tetapi militan dan penuh disiplin. Tanggapan yang paling baik terhadap PKI terdapat di kecamatan-kecamatan Ponjong dan Karangmojo di Gunung Kidul. (5) Gerindo, partai yang dipimpin oleh Pangeran Suryodiningrat diorganisir secara lokal dengan pengikut yang cukup besar. Gerindo dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali dari *Pakempalan Kawulo Ngajogjakarta* (PKN) sebelum perang. Selain lima partai di atas, ada partai yang relatif kecil seperti Partai Katholik dan Parkindo.

Kesuksesan PKI, dari mendirikan

Lembaga Marx (*Marx House*) sampai gerakan BTI untuk perjuangan petani, selain memperluas spektrum bagi pengikut partai, juga memperkuat posisi tawar politik partai. Pada tahun 1946, pemerintah daerah istimewa Jogjakarta menerima saran BTI untuk menghapuskan pajak kepala atas kaum tani.<sup>8</sup> Sedangkan pada tahun 1948, BTI memobilisasi kaum tani Sleman dan Bantul untuk mendesak pemerintah agar menghapuskan "hak-hak konversi" atas tanah-tanah bekas perkebunan Belanda dan menyerahkan tanah itu kembali ke rakyat. Mobilisasi ini membuahkan hasil dengan dikeluarkannya UU no. 13 tanggal 26 April 1948 tentang penghapusan "hak-hak konversi" oleh KNI.

## PEMILU 1955

Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih para anggota DPR dan anggota konstituante. Di Jogjakarta, sebelum pemilu 1955 pada bulan September-Desember, pernah diadakan pemilu pertama pada tahun 1951 untuk DPR Daerah Istimewa Jogjakarta. Namun mungkin sebab tujuan yang lokal dan eksperimen untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilu yang lebih besar, pemilu 1951 di Jogjakarta kenyataannya tidak dapat mendekatkan antara partai politik dengan rakyat.

Pemilu 1955 di tingkat nasional

<sup>8</sup>Dekrit Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 29 Juni 1946, no. 49.

epang. Partai ini berpusat di Jogjakarta menghasilkan empat partai besar; PNI mendapat 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 16,4% dan PKI 16,4%. Sementara pemilu 1955 di Jogjakarta menghasilkan perolehan suara sebagaimana dalam table.

Nama Partai	Jumlah Suara	
	DPRD	Konstituante
PKI	43.954	39.713
PNI	21.839	30.048
Masyumi	17.982	16.783
NU	2.395	2.924

Sumber: Harian Pagi Nasional, tanggal 16 Desember 1955, hal. 2.

Kesuksesan PKI dalam pemilu 1955, diulangi lagi dalam pelaksanaan pemilu 1957 untuk pemilihan DPR Daerah Istimewa Jogjakarta. Dari 45 kursi yang diperebutkan, PKI memperoleh 14 kursi, PNI 8 kursi, Gerinda 6 kursi. Sedangkan dari seluruh perwakilan DPR propinsi, kota dan kabupaten di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta PKI mendapatkan 64 kursi, PNI 37 kursi, Masyumi 29 kursi dan Gerinda 28 kursi, dari seluruh kursi yang berjumlah 207.<sup>9</sup> Kesuksesan strategi dan taktik pergerakan politik PKI bagaikan jembatan untuk bangkit dari memori tentang penjajahan. Satu hal yang selalu para ksatria impikan.

## MENJELANG PERISTIWA 1965/66

Pembubaran Masyumi dan PSI karena tuduhan keterlibatannya dalam PRRI dan Permesta turut mempengaruhi konstelasi politik di Jogja. Kekuatan politik partai terbagi menjadi dua kutub; progresif revolusioner dan kontra revolusioner.

Kelompok progresif revolusioner terdiri atas golongan Nasakom; Nasionalis diwakili PNI, Agama diwakili NU dan Komunis diwakili PKI. Kelompok ini pula yang pada tahun 1959 bergabung dalam satu front bersama yang disebut Front Nasional (FN). Sedangkan kelompok kontra revolusioner adalah Masyumi, PSI, Murba dengan semua organisasi masa underbouw partai, termasuk HMI.

Isu Neo Kolonialisme dan Imperialis (Nekolim) mendorong Pengurus daerah Front Nasional DIJ untuk menyelenggarakan Rapat Akbar Dwi Komando Rakyat di Alun-alun Utara, pada tahun 1962, yang dihadiri langsung oleh Presiden Soekarno. Gaung slogan ganyang Nekolim yang dikampanyekan Soekarno di Jogjakarta terus berlangsung. Pada tanggal 14 Agustus 1965 pengganyangan Nekolim diwujudkan gerakan massa dengan pendudukan atas gedung *Jefferson Library* di Jalan Diponegoro.<sup>10</sup> Pendudukan dilakukan dengan upacara resmi yang dihadiri Tolchah Mansoer SH dan

<sup>9</sup>Majalah *Dirgahayu*, no. 8, tahun ke-9, Januari 1958. Lihat pula Selo Soemarjan, op cit, hlm. 153.

<sup>10</sup>Jefferson Library adalah perpustakaan dan pusat informasi dari kedutaan Amerika Serikat, seperti USIS di Jakarta.

Soetrisno, anggota Badan Pengurus Harian, wakil dari pemerintah propinsi, FN DIJ, militer, dan kepolisian serta wakil-wakil parpol dan ormas dan massa pemuda, buruh, tani, dan wanita yang berporoskan Nasakom. Gerakan massa untuk pendudukan gedung Jefferson Library dimaklumkan mendapat restu dari Waperdam I Dr. Soebandrio dan Kepala Daerah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selanjutnya gedung tersebut ditempati sebagai pusat kegiatan revolusioner dari poros Nasakom, yaitu FN DIJ, FN Kotapraja Jogjakarta, Front Pemuda, PPMI, GOWJ, Sekretariat Perjuangan Buruh, Sekretariat Ormas Tani.<sup>11</sup>

### “Universiteit Revolutioner”

Semangat progresif revolusioner yang menjadi ciri khas masa tahun 60-an, juga berimbas pada kampus-kampus di Jogjakarta. Peta kekuatan progresif intelektual dan mahasiswa terbesar terdapat di UGM, IKIP Jogja dan IAIN Sunan Kalijaga. Di UGM, selain HMI yang dicap sebagai kontra revolusioner, ada HIS, Germindo dan GMKI, meskipun secara keseluruhan kelompok CGMI mendominasi.<sup>12</sup> Selain HMI, semua bergabung dalam PPMI. Di IKIP peta kekuatan serupa di UGM.<sup>13</sup>

Sedang di IAIN, PMII mendominasi dengan sedikit HMI. Massa kuat CGMI juga berada di Universitas Res Publika (Ureca) di jalan Trikora dan Universitas Rakyat (Unra) di jalan Pingit. Gerakan pengganggangan kepada kaum anti Nasakom di lingkungan kampus dilakukan oleh PPMI. Konflik antar gerakan mahasiswa terjadi di universitas antara PPMI dan PMII versus HMI yang dianggap “setan universitas” dan kontra revolusi.<sup>14</sup>

Di kalangan pelajar progresif revolusioner, monopoli IPPI menjadi pertentangan. Pada tanggal 27 September 1965, Front Pelajar berporos Nasakom menyelenggarakan Apel Besar Brigade Sukarelawan Pelajar DIJ. Di saat IPPI menentukan Hari Ikrar Pelajar secara sepihak, mendapatkan tentangan dari GSNI, IPNU, ISKI, IPM, dan IPPNU yang merasa bagian dari kekuatan pelajar progresif revolusioner, dan reaksi boikot atas Hari Ikrar Pelajar yang diselenggarakan IPPI.<sup>15</sup>

Sementara di sektor pemuda, perang antara India melawan Kasmir dan Pakistan menyatukan poros Nasakom Jogja. Pada tanggal 20 September 1965, di lapangan militer Secodiningratan, Front Pemuda DIJ menyelenggarakan Rapat

<sup>11</sup>Harian Pagi Nasional, 16 Agustus 1965.

<sup>12</sup>Seorang mantan pimpinan pusat CGMI di Jakarta menyebutkan bahwa kebijakan politik poros Nasakom menjadi alasan bagi Soekarno untuk “memaksa” CGMI bergabung dengan PKI di parlemen. Wawancara pribadi, 23 Juni 2002.

<sup>13</sup>Mobilitas “mahasiswa progresif revolusioner” di IKIP, lihat *Harian Pagi Nasional*, 28 Agustus 1965.

<sup>14</sup>Wawancara pribadi dengan eks tim screening UGM, 25 Mei 1965.

<sup>15</sup>Harian Pagi Nasional, 27 September 1965.



dan menyerukan resolusi kecaman atas India, yang ditandatangani Presidium Front Pemuda DIJ yang terdiri dari Pemuda Marhaen, Pemuda Ansor, Pemuda Rakyat, PPMI, dan Pemuda Katholik. Dukungan yang sama dilakukan Front Pemuda DIJ terhadap penyelenggaraan KIAPMA (Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing).<sup>16</sup>

### Mobilisasi Umum untuk Dwikora

Wujud dukungan terhadap kebijaksanaan luar negeri yang berkonfrontasi dengan Malaysia ditunjukkan dengan penyelenggaraan latihan-latihan kemiliteran atau *training center* (TC) oleh tiap-tiap organ dari partai politik, ormas, organisasi profesi atau dari sukarelawan dari pegawai negeri. TC-TC dilaksanakan di kampung-kampung sampai lapangan seperti Kridosono maupun di Cebongan Sleman. Pemuda Rakyat juga mengadakan TC di Kota Gede dan Cebongan dengan instruktur dari Korem 072 dan Kodim Jogja.<sup>17</sup> Senjata yang digunakan bukan berjenis *jung* buatan RRT, tetapi senjata laras panjang bekas Belanda dan Jepang. Peserta TC dari Pemuda Rakyat di Kota Gede sekitar 3 peleton. Pemuda Ansor juga terlibat sebagai peserta dalam TC di Cebongan Sleman.<sup>18</sup>

Pertunjukan demonstratif oleh Persatuan Front Nasional DIJ terjadi saat peringatan Dwi Dasa Warsa Kemerdekaan pada tanggal 25 Agustus, dengan sebuah Rapat Umum dan pawai Nasakom. Pawai terbesar dan terpanjang dalam sejarah revolusi,<sup>19</sup> diikuti lebih dari 1500 peleton yang terdiri dari pemuda, pelajar, mahasiswa, buruh, tani, wanita, seniman, kesatuan-kesatuan hansip, sukarelawan, dan ABRI, baik yang tergabung dalam partai poros Nasakom maupun yang merupakan kesatuan-kesatuan lainnya.<sup>20</sup> Pawai mengambil rute dari Gedung Negara, Jl. Ahmad Dahlan, Suryobrantan, putar benteng Kraton, Gondomanan, Sayidan, Jl. Tanjung, Kridosono, kembali dan bubar di Gedung Negara, sampai pukul 3 pagi.<sup>21</sup>

### PERISTIWA INTERN KOREM 072

Peristiwa Gerakan 30 September di Jogja secara kronologis dimulai ketika terjadi penculikan terhadap Komandan Korem Katamso dan Kasremnya Sugiyono. Pada tanggal 1 Oktober 1965, penculikan dilakukan oleh Mayor M, Kepala Seksi 5 Korem 072 bidang Pembinaan Veteran, dengan membawa pasukan dari Seksi I Batalyon L Kentungan, yang dipimpin Peltu S. Keduanya dibawa ke Markas Batalyon L dengan menggunakan

<sup>16</sup>Harian Pagi Nasional, 21 September 1965.

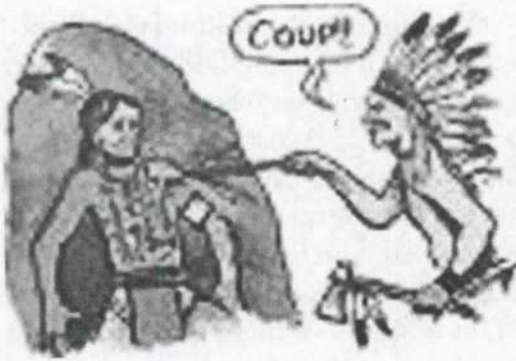
<sup>17</sup>Wawancara pribadi dengan eks peserta TC di Kota Gede, 25 Juni 2002.

<sup>18</sup>Wawancara pribadi dengan eks komandan Banser, peserta TC di Cebongan, 30 Juli 2002.

<sup>19</sup>Seluruh informan saksi hidup memberikan komentar sama.

<sup>20</sup>Harian Pagi Nasional, 26 Agustus 1965.

<sup>21</sup>Wawancara pribadi dengan eks Banser, 31 Maret 2002.



Umum Pengganyangan Imperialis India, mobil gaz untuk selanjutnya ditempatkan di ruang Komandan Batalyon L (Mayor W), dan atas perintah Pelda K (Dan Security Jon L), eksekusi dilakukan oleh Sertu AT bertempat di sebelah selatan lapangan Batalyon L, di dekat batas kawat berduri. Seluruh rangkaian peristiwa dari penculikan, penahanan, eksekusi dan penguburan terjadi antara dan di kalangan militer. Sedang tentara eksekutor dalam pengadilan militer memberikan pengakuan adanya perintah komandannya untuk mengeksekusi sebab pertentangan internal militer antara tentara yang nekolim dan progresif.<sup>22</sup>

Setelah pelaksanaan eksekusi, tentara yang pro G30S menduduki RRI Jogjakarta dan menyiarkan pidato dari Mayor Mulyono sebagai Komandan Korem yang baru sekaligus menjadi ketua Dewan Revolusi (Derev). Kemudian pada tanggal 2 Oktober diadakan defile kelompok progresif revolusioner untuk mendukung

Derev yang dilakukan unsur PKI, Nasionalis Kiri dan militer yang kebanyakan dari Jon L dan C. Defile yang diadakan sepanjang jalan Trikora sampai Alun-alun Utara menandai perebutan komando militer di Korem 072 dan bukan perebutan kekuasaan pemerintahan sipil yang waktu itu dijabat Sri Paku Alam VIII sebagai pejabat Kepala Daerah ataupun terhadap Sudarisman Purwokusumo SH sebagai Walikota Kotapraja Jogjakarta.

Sampai tanggal 4 Oktober, Korem 072 tetap di bawah kekuasaan Mayor Mulyono. G30S juga mendapatkan dukungan dari kelompok veteran Jogja. Tetapi berita pengumuman Pangkostrad Soeharto melalui RRI Jakarta pada tanggal 2 Oktober di Jakarta, dan statement NU tanggal 5 Oktober menambah kebingungan. Pada tanggal 5 Oktober, setelah dapat menguasai kembali Kodam VII Diponegoro dari G30S Semarang di bawah pimpinan Kolonel Inf Sahirman<sup>23</sup> dan Letkol Inf Usman, Panglima Kodam VII Diponegoro Brigjen Suryosumpeno mengundang Derev Jogja di Rindam Magelang. Mayor Kartawi, Kepala Seksi 2 Korem 072, sebagai wakil Mayor Mulyono dalam struktur Derev Jogja memenuhi undangan. Sepulang dari Magelang, Mayor Kartawi mengumpulkan para perwira dan memulihkan slagorde Korem 072 ke dalam Kodam VII Diponegoro. Pada hari itu juga bertempat di Korem 072, Pangdam VII Diponegoro

<sup>22</sup>Kesaksian Mahkamah Militer Daerah Jogjakarta, tidak dipublikasikan.

<sup>23</sup>Pada beberapa sumber ditulis sebagai Letkol Suherman, Lihat Benedict ROG Anderson dan Mc Vey, Kudeta .. op. cit.

Brigjen Suryosumpeno memberikan briving kepada perwira Korem 072 dan menunjuk Kolonel Widodo yang sebelumnya Asisten IV Kas Kodam VII Diponegoro untuk memegang pimpinan sementara atau menjadi caretaker Danrem 072 dengan tugas memulihkan kembali slagorde Korem 072 dan memulihkan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono pada jabatannya seperti sebelum terjadinya G30S.<sup>24</sup>

Dari Magelang, Kol Widodo memba-wa pasukan pengawal 2 regu BTR Kavaleri dan 1 pasukan peleton RPKAD. Keadaan genting hampir memicu pertempuran terbuka di dalam kota, terutama di saat akan diambilnya jenazah Katamso dan Sugiyono di markas Batalyon L Kentungan. Penghindaran dari pertempuran terbuka dilakukan dengan jalan mengirimkan Batalyon L Brigif VI ke perbatasan Malaysia pada tanggal 18 Oktober 1965, untuk kemudian dilucuti senjatanya di dalam kapal yang membawa ke Batanghari oleh kesatuan Brawijaya dan di Pematang Siantar diperiksa oleh pasukan Brawijaya yang lebih dahulu datang.<sup>25</sup> Sementara di Jogja, setelah Jon

L yang dipimpin Mayor W keluar markas, pada tanggal 20 Oktober diadakan pencarian dan penggalian kuburan Katamso dan Sugiyono dan dimakamkan di Semaki.<sup>26</sup>

## PASCA PERISTIWA 1965/1966

Pilihan untuk mendukung Derev dan kebingungan bersikap, menjadi jalan simpang perebutan makna simbolik dari slogan progresif revolusioner. Pernyataan ketua NU pusat di Jakarta yang mengutuk G30S, menjadi jalan yang dipilih militer anti G30S di bawah pimpinan caretaker Danrem 072 Kol Widodo untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan PNU Jogja,<sup>27</sup> untuk kemudian pembicaraan diperluas dengan Muhammadiyah, PSII dan Parmusi.<sup>28</sup>

Rentang hari antara tanggal 2 sampai 20 Oktober, di dalam masyarakat muncul penggerombolan massa, perang panflet dan rumor tentang tanda-tanda khusus di rumah-rumah tokoh NU dan PNI.<sup>29</sup> Seruan Kedua "*Djangan bergerombol dan bersendjata diwaktu malam*" dengan persetujuan dari Wk. Kepala Daerah DIJ, Paku Alam VIII, dikeluarkan oleh Ko-

<sup>24</sup>Harian Pagi Nasional, 21 Oktober 1965.

<sup>25</sup>Wawancara pribadi dengan eks militer, 3 April 2002.

<sup>26</sup>Harian Pagi Nasional, 21 Oktober 1965.

<sup>27</sup>Wawancara pribadi dengan eks militer Jogja, 3 April 2002.

<sup>28</sup>Wawancara pribadi dengan eks Waket FN Kotamadya Jogja/eks waket KAP G30S dari NU, 28 Mei 2002.

<sup>29</sup>Rumor tanda khusus di depan rumah-rumah terutama berkembang di desa-desa, setelah tanggal 5 Oktober, wawancara pribadi dengan eks Anzor Gunung Kidul, 31 Maret 2002.

mandan Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 96 Jogja, Drs. R. Hartono. Satu seruan berisi untuk menghindakan tindakan sendiri-sendiri oleh ormas, orpol dan golongan masyarakat dan menghentikan perang panflet.

Sejak tanggal 5 Oktober, muncul ungkapan G30S sebagai gerakan pada para (tentara) "petualang yang anti revolusi". Dan pada tanggal 20 Oktober 1965, diadakan Apel Besar Rakyat Progresif Revolusioner Jogjakarta di Alun-alun Utara yang diprakarsai oleh Front Pancasila KAP G30S<sup>30</sup> dan Gerakan Umat Islam, sebagai bagian dari aksi mengutuk G30S yang kontra revolusi. Idham Chalid hadir dan secara tegas menyatakan bahwa PKI menjadi dalang G30S. Carataker Danrem 072, Kol Widodo menguatkan dengan pernyataan sama.

Setelah apel, massa bergerak menyerbu gedung-gedung kantor PKI dan ormasnya. Bentrokan fisik terjadi antara orang-orang PKI yang mempertahankan dan kelompok Islam yang menyerang gedung CHTH (*Chung Hwa Tsung Hwi*) yang

menjadi kampus Universitas Res Publika (Ureka) dan kantor Baperki di jalan Trikora. Danrem 072, Kol Widodo, selaku Pengawas/Koordinator Pembantu Peperada DIJ-Surakarta dan Kedu, menyatakan keadaan darurat militer dan mengeluarkan pengumuman tertanggal 25 Oktober, PENG-PKPPDD.004/10/1965, bahwa gerakan G30S adalah gerakan yang dipelopori oleh PKI dengan ormasnya dan meminta kepada rakyat yang progresif dan revolusioner untuk membantu ABRI menumpas habis PKI dan ormas-ormasnya sampai ke akar-akarnya.

Hari-hari berikutnya, tokoh-tokoh Front Pancasila KAP G30S mendapat pinjaman pistol.<sup>31</sup> Sementara massa bergerak melakukan penyerangan dan penangkapan untuk diserahkan kepada tentara/polisi terdekat untuk dipenjara atau dengan truk-truk tentara dibawa ke Luweng Si Grubug Gunung Kidul, hutan Kaliwiro Wonosobo atau dibawa ke pinggir Sungai Opak untuk dieksekusi. Entah siapa ksatria, atau paria. ❖

---

<sup>30</sup>Setelah pertemuan Kol Widodo dengan tokoh-tokoh ormas-orpol selain PKI, pertemuan ormas dan orpol non PKI bertempat di rumah pengurus PSII, Haji S di Sentul, sepakat mendirikan Front Pancasila KAP G30S. Wawancara pribadi, 28 Mei 2002.

<sup>31</sup>Wawancara pribadi, 28 Mei 2002.